

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

Maria S.W Sumarjono, Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi, (Jakarta , Buku Kompas,2006)

Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press 1999)

Muhammad Bakri, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria), (Yogyakarta: Citra Media, 2007),

Maria S.W. Sumardjono, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, (Jakarta; Kompas, 2008),

Adrian Sutedi, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Cst Kansil, Kamus istilah hukum, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009

Lj Van Opeldoorn dalam shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir, PT Revika, Aditama, Bandung, 2006

Manulang E Fernando M, Menggapai Hukum Berkeadilan, buku Kompas, Jakarta, 2007

Ansori Abdul Gani, Filasafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan, university of gajah mada, Yogyakarta 2006,

Winahyu Erwiningsih, Aktualisasi Hukum Agraria Guna Menunjang Otonomi Daerah, Jurnal Hukum Ius Quialustum, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2000

- Mudakir Iskandar Syah, Pembebasan Tanah & Reklamasi Untuk Pembangunan Kepentingan Umum, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2018
- Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial & Hukum, Granit, Jakarta, 2004
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Kencana, Jakarta. 2005,
- John Salindeho, Masalah Tanah dalam Pembangunan, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1988
- Muhamad Yamin Lubis & Abdurrahim Lubis, Pencabutan Hak, Pembebasan Dan Pengadaan Tanah, Cet 1 Mandar Maju, Bandung 2011
- Abdurrahman, Masalah Pencabutan Hak Atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Mudakir Iskandar Syah, SH, MH, Pembebasan Tanah Dan Reklamasi Untuk Pembangunan Kepentingan Umum, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2018
- Perlindungan A.P, "Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria", Mandar Maju, Bandung, Cer.VIII, 1998
- Boedi Harsono. 1997. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional. Djambatan, Jakarta
- AA. Oka Mahendra, Menguak Masalah Hukum, Demokrasi Dan Pertanahan, Pustaka Sinar Harapan, Cet I, Jakarta, 1996

Umar Said dan Suratman, *Hukum Pengadaan Tanah*, Setara Press, cet. II, Malang, 2015

Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982

Urip Santoso, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga, Surabaya, 2013

Arie S. Hutagalung, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta, 2005,

Amiruddin A Dajaan Imami, *Hukum Penataan Ruang Kawasan Pesisir Harmonisasi dalam Pembangunan Berkelanjutan*, Bandung: Logoz Publishing, 2014

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007

A. Mukti Arto, *Mencari Keadilan, Kritik, dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001

Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Tugu Jogja, Yogyakarta, 2008

Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

R.F. Saragih, Fungsionalisasi ADR dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Jurnal Hukum, Vol.7 No 13, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2000

2. MAKALAH DAN ARTIKEL

Wiji Nurhayat, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Kumparan, <https://kumparan.com/wiji-nurhayat/pinjaman-dana-proyek-kereta-cepat>, 24 Maret 2020.

<https://bisnis.tempo.co/read/1311159/jalur-kereta-cepat-jakarta-bandung>, 23 Februari 2020,

<https://kppip.go.id/opini/tanah-untuk-kepentingan-umum/> diakses pada 3 Maret 2019.

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5c138e6c4afc0/mengurai-benang-kusut-problematika-pembebasan-lahan-serta-solusinya> diakses pada 3 Maret 2019

Maria S.W Soemardjono, Telaah Konseptual Terhadap Beberapa Aspek Hak Milik, Sebuah Catatan Untuk Makalah Chadijdjah Dalimunte, Konsep Akademis Hak Milik Atas Tanah Menurut UUPA, Makalah Dalam Seminar Nasional Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara – Badan Pertanahan Nasional Medan 19-20 September 1990

Sukirman Azis, Hak Milik Berfungsi Sosial,

<http://sukirman.weebly.com/1/post/2011/02/hak-milik-berfungsi-sosial.html>

Wikipedia, Hak Atas Tanah, [http://id.wikipedia.org/wiki/Hak atas tanah](http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_atas_tanah),

Wisnu Nur Baskoro, Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah

<http://civicsedu.blogspot.com/2012/06/asas-fungsi-sosial-hak-atas-tanah-hukum.html>,

Jurnal Yustisia, Vol 5 No 2 Mei-Agustus 2016, Kebijakan Pemberian Ganti Rugi.

<https://www.wartaekonomi.co.id/read254519>

Ida Nurlinda, "Penyelesaian Sengketa dan/atau Konflik Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, *Makalah Seminar Nasional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2012*, Program Pascasarjana, Universitas Airlangga, Surabaya, 27 November 2012

Urip Santoso, "Perlindungan Hukum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum", *Jurnal MAGISTER HUKUM*, Volume 5 Nomor 1, Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum, Universitas Wisnuwardhana, Malang, April 2014

Boedi Harsono, "Aspek Yuridis Penyediaan Tanah", *Majalah HUKUM dan PEMBANGUNAN*, Nomor 2 Tahun XX, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, April 1990

3. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada Diatasnya;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;

Surat Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 738/29.1-600/III/2018 tanggal 07 Maret 2018

perihal Permohonan Petunjuk Penyelesaian Tanah Sisa dan Tanah Terdampak;

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031;

4. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 37/Pdt.G/2018/PN KWg, tertanggal 26 Juni 2018 ;

Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 33/Pdt.G/2018/PN KWg, tertanggal 25 April 2018 ;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 473.K/Pdt/2019, tertanggal 21 Februari 2019 ;

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2941.K/Pdt/2019, tertanggal 30 Oktober 2018 ;